

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pengelolaan Aset Daerah berupa Tanah dan Bangunan sebagai salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Depok secara umum telah berpedoman pada kebijakan. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Namun berdasarkan penelitian yang merupakan deskripsi dari data yang di peroleh masih dapat ditemukan beberapa permasalahan yang berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan kebijakan tersebut. Adapun kesimpulan untuk masing-masing aspek dapat dikemukakan sebagai berikut:

##### **1. Aspek Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran**

Pada Aspek Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran aset daerah dari kebijakan yang ditetapkan sudah sesuai dengan kebijakan. Melihat kondisi pengelolaan aset daerah saat ini.

##### **2. Aspek Pengadaan**

Pada Aspek Pengadaan aset daerah dari kebijakan yang ditetapkan sudah sesuai dengan kebijakan. Melihat kondisi pengelolaan aset daerah saat ini.

##### **3. Aspek Penggunaan**

Pada Aspek Penggunaan aset daerah dari sisi kebijakan yang ditetapkan sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Tetapi melihat kondisi pelaksanaan Penggunaan tanah dan dan bangunan saat ini, masih ditemukan masih kurangnya tindakan-tindakan yang tegas terhadap masyarakat yang tidak patuh dalam penggunaan aset daerah.

#### **4. Aspek Pemanfaatan**

Pada Aspek Pemanfaatan aset daerah melihat dari sisi kebijakan yang ditetapkan sudah diatur dengan kebijakan yang sangat baik. Tetapi melihat kondisi pengelolaan aset daerah saat ini, Pemanfaatan aset daerah berupa tanah dan bangunan berupa Sewa, masih terdapat kurangnya peningkatan dan pengembangan strategi yang baik dalam pelaksanaan pemanfaatannya. Dikarenakan Pemanfaatan dalam bentuk Sewa aset daerah merupakan bagian dari pendapatan asli daerah sebagai pendukung pembangunan daerah di Pemerintah Kota Depok.

#### **B. Saran**

Terkait dengan permasalahan yang ada pada pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah berupa tanah dan bangunan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah Pemerintah Kota Depok, melihat dari 2 aspek tersebut, Penulis memberikan saran sebagai berikut:

##### **1. Aspek Penggunaan**

Saran yang dapat diberikan kepada bidang Pengelolaan Aset Badan Keuangan Daerah Kota Depok. Pengelolaan Aset Daerah terkait Penggunaan harus lebih meningkatkan pengawasan pada objek lahan dan para pengguna. Mengurangi risiko kesalahan dalam penggunaan tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Depok, yang diperoleh dari Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utility (PSU) perumahan dari ketidakpatuhan pada aturan izin peruntukan penggunaan aset daerah berupa tanah dan bangunan.

##### **2. Aspek Pemanfaatan**

Saran yang dapat diberikan kepada bidang Pengelolaan Aset Badan Keuangan Daerah Kota Depok. Pengelolaan aset daerah terkait Pemanfaatan aset daerah berupa tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Depok, yang diperoleh dari Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utility

(PSU) perumahan adalah dilaksanakannya *cheking on the spot* terhadap seluruh aset daerah berupa tanah dan bangunan secara berkelanjutan. Adanya komitmen, sinergitas dan dukungan serta menjaga hubungan dengan seluruh stakeholder internal dan eksternal. Sehingga terwujud pengelolaan aset yang tertib sesuai peraturan yang berlaku.

Terciptanya potensi pemanfaatan berupa Sewa tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Depok yang optimal. Pemanfaatan pada bentuk Sewa aset daerah sebagai Sumber Pendapatan Daerah agar dimanfaatkan secara optimal dengan menganut prinsip komersial.



POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- A. Gima Sugiama. 2013. *Manajemen Aset Pariwisata*. Bandung: Guardaya Intimata.
- Aira, Aras. (2015). *Peranan Manajemen Aset Dalam Pembangunan Daerah*. Jurnal Kutub Khanah.
- Basuki. 2000. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Karya Tulis Widyaiswara Pundiklat Pegawai BPK.
- Chabib Soleh, Heru Rochmansjah. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Bandung : Fokusmedia.
- Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah. 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Fokus Media : Bandung
- Conway, F., Kaganova, O., & McKellar, J. (2006). A “Composite Image” of Central Government Asset Management Reforms. *Managing government property assets: International experiences*,
- Dwi Martani, dkk. 2012. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta: Salema Empat.
- Government of Australia, *Department of Treasury and Finance. Asset Management Series Part 2*. 2000. Victoria State Government
- Haryono, A. (2007). *Modul Prinsip dan Teknik Manajemen Kekayaan Negara*. Tangerang: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Pusdiklat Keuangan Umum.
- Hidayat. 2014. *Manajemen Aset (Privat dan Publik)*. Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Hikmawati, Putri. 2012. *Sinkronisasi Dan Hemonisasi Hukum Penyelenggaraan Otonomi Daerah Studi Di Provinsi Bali*.
- Husaini.Usman. 2008. *Manajemen*. (Jakarta: Bumi Putra)
- Usman, Husaini. 2008. *Manajemen Teori, Praktis, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: (Edisi Kedua). UPP STIM YKPN.

Mahmudi, 2010, *Manajemen Keuangan Daerah*, Jakarta: Erlangga

Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* Edisi 3. Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi Yogyakarta.

Ricky Griffin, W, dan Ronald J Ebert. 2002. *Management*, Erlangga, Jakarta.

Robbins, Stephen & Coulter, Mary, 2002, *Managemen*, Jakarta: Gramedia.

Salim Y Salim P, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, edisi pert (Jakarta: Modern English Press, 1991).

Siregar, Doli D. 2004. *Manajemen Aset*. Jakarta: Gramedia.

Siti Kurnia Rahayu, 2017, *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*, Bandung: Rekayasa Sains.

Slamet soelarno, 1999. *Pajak Daerah dan Restribusi Daerah*. Jakarta STIA LAN Prees.

Slamet soelarno, 2001. *Administrasi Pendapatan Daerah*. Seri Pengetahuan Pendapatan Daerah. Jakarta STIA LAN Prees.

Subekti 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta. Intermasa.

Sugiamana, Gima, 2013 *Manajemen Aset Paiwisata Bandung*:Guardaya Intimarta.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Supriyadi Pamungkas. 2013. *Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Karyawan Menggunakan Metode AHP*. Yogyakarta : PERPUSTAKAAN STMIK AKAKOM.

Yusuf, M. 2010.*Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Jakarta: Salemba Empat.

## B. Jurnal:

- Abdul Rajab. (2020). Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Mamuju. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*; 2716-2443.
- Ahdi Topan Sofyan, Ryan Hidayat. Eko Suryaningsih. (2021). Analisis Pemanfaatan Sewa Barang Milik Daerah (Bmd) Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017- 2019. *Jurnal Syntax Idea*; 2684-883X.
- Ahmad Fajri, Ahmad Djalalludin, Siswanto. (2018). Pengelolaan Aset Tanah Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. *Jurnal Islamic Economics Quotient Vol. 1 No. 2 Mei – Juni 2018*; 22599-3526.
- Ambar Sari Hadiyanti, Aida Nahar. (2018). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Jepara. *Jurnal Rekognisi Akuntansi*; 2548-5644.
- Annisa Syafitrah Sakeh, Nur Diana, M. Cholid Mawardi. (2022). Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *E-JRA Vol. 11 No. 04 Agustus 2022*
- I Putu Chio Kanaiya, I Ketut Mustanda. (2020). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Berpengaruh Terhadap Belanja Modal Pemerintah. *e-Jurnal Manajemen, Vol. 9, No. 3, 2020 : 1109-1128; 2302-8912.*
- Kaganova, O., & Nayyar-Stone, R. (2000). Municipal real property asset management: An overview of world experience, trends and financial implications. *Journal of Real Estate Portfolio Management, 6(4), 307-326. Retrieved from ProQuest Central*
- Komang Adi Kurniawan Saputra, A.A Ketut Jayawarsa, Putu Budi Anggiriawan. (2019). Dukungan Pemerintah Daerah, Optimalisasi Asset Dan Profesionalisme Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad). *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol. 4. No. 1 (2019) 607- 622; 2548-4346.*
- Labasido, E. dan Darwanis. 2019. Analisis Pengendalian Aset Tetap Daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)

Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* 4(2).

Mirza Maulinarhadi, Rosalita Rachma Agusti. Peran Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dan Alternatif Kebijakan Pajak Untuk Umkm Dibidang Pariwisata Pasca Bencana. *Open Journal Systems, Vol.14 No.3 Oktober 2019; 2615-3505*.

Mokodompit, D., Morasa, J., & Warongan, J. (2017). *Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kota Kotamobagu. JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL" Vol 8, No 1 (2017)*.

Muhammad Octo Adhitama, Diana. (2019) Strategi Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; 2442-6962*

Mulalinda, Veronika, & Tangkuman, Steven J. (2014). Efektivitas penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten sitaro. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 2(1). Google Scholar*.

Nuramelia.2014.Defenisi pemerintah dan pemerintahan. Jakarta [https://nuramelia99.wordpress.com/2014/07/02/pemerintah dan pemerintahan/](https://nuramelia99.wordpress.com/2014/07/02/pemerintah-dan-pemerintahan/).

Rina Tresnawati, Erinisa Aini Putri. (2017). Tinjauan Atas Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bandung, *Jurnal Aset (Akuntansi Riset); 2541-0342*.

### **C. Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42).

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142).

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Dan Pemukiman di Daerah .

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.07/2015 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 725).

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 3).

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Penyerahan Prasarana Sarana Dan Utilitas Perumahan Dan Pemukiman Oleh Pengembang Di Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2018 Nomor 7).

Peraturan Wali Kota Depok Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 64).

Keputusan Wali Kota Depok Nomor : 903/096/Kpts/BKD/2019 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok.

#### **D. Dokumen-dokumen lainnya:**

Nina Suzana, Rencana Strategi (RENSTRA) Tahun 2021-2026, Depok 2021.